Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai suatu reaksi terhadap sistem perekonomian kapitalisme di negara-negara Eropa. Sistem ekonomi ini bertumpu pada kebebasan individu untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Akibatnya, kaum kapitalis dapat menguasai rakyat, mereka hidup berlebihan sedangkan masyarakat makin tertindas. Pada saat itulah muncul aliran kebersamaan yang menentang aliran individualisme ini dengan asas kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Bentuk kerjasama ini melahirkan suatu perkumpulan yang dinamakan koperasi. Sementara di Indonesia sendiri koperasi lahir pada abad ke-20, koperasi lahir dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak.

Istilah koperasi berasal dari bahasa asing yaitu *Co-Operation* dimana *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti usaha sehingga secara harfia koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama.

Koperasi berkembang menjadi organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967, UU No. 25 Tahun 1992 dan diperbaharui dalam UU No. 17 Tahun 2012.

Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 17 tahun 2012 adalah:

- 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masingmasing anggota
- 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5. Kemandirian pendidikan perkoperasian
- 6. Kerjasama antar koperasi

2.1.2 Ruang Lingkup SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP 1.1 (2009), Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Dewan tandar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sendiri beranggotakan 17 orang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen.

Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

- Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
 Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:
 - a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE)
 Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK
 ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.

- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
- 2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah:

- a. pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha
- b. kreditur; dan
- c. lembaga pemeringkat kredit.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka terdapat beberapa ketentuan transisi dalam SAK-ETAP yang cukup ketat:

- 1. Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK-ETAP, yakni 1 January 2011 Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK-ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.
- 2. Per 1 January 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP.

- 3. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK-ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan public di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali.
- 4. Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.

2.1.3 Perbedaan SAK ETAP dan PSAK

Di bawah ini merupakan tabel perbedaan SAK ETAP dan PSAK khususnya dalam bagian laporan keuangan.

Tabel 2.1 Perbedaan PSAK dan SAK ETAP

No	Elemen	PSAK	SAK ETAP
1	Penyajian Laporan	 Laporan posisi 	Sama dengan PSAK,
	Keuangan	keuangan	kecuali informasi yang
		 Informasi yang 	disajikan dalam neraca,
		disajikan dalam laporan	yang menghilangkan pos:
		posisi keuangan	 Aset keuangan
		 Pembedaan asset lancar 	 Properti investasi
		dan tidak lancar dan	yang diukur pada nilai
		laibilitas jangka pendek	wajar (ED PSAK 1)
		dan jangka panjang	 Aset biolojik yang
		 Aset lancar 	diukur pada biaya
		 Laibilitas jangka 	perolehan dan nilai

		pendek • Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan (Perubahan istilah di ED PSAK 1: Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, Kewajiban (liability) menjadi laibilitas)	wajar (ED PSAK 1) • Kewajiban berbunga jangka panjang • Aset dan kewajiban pajak tangguhan • Kepentingan nonpengendalian
2	Laporan Laba Rugi	 Laporan laba rugi komprehensif Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi Komprehensif Laba rugi selama periode Pendapatan komprehensif lain selama periode Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan 	Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi.
3	Penyajian Perubahan Ekuitas		Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain.
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	 Catatan atas laporan keuangan Struktur Pengungkapan kebijakan Akuntansi Sumber estimasi ketidakpastian Modal (ED PSAK 1) Pengungkapan lain 	Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.

5	Laporan Arus Kas	 Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung Arus kas aktivitas investasi Arus kas aktivitas pendanaan Arus kas mata uang asing Arus kas bunga dan 	Sama dengan PSAK kecuali: Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung Arus kas mata uang asing, tidak diatur.

Sumber: Majalah Akuntan Indonesia; Edisi No.19/Tahun III/Agustus 2009

2.1.4 Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.1 (2009), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi tertentu dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.5 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi:

1. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan

perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto.

3. Laporan perubahan ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan:

- Suatu perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, atau
- Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.1.6 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009) karateristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami.

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat yang mengerti tentang ekonomi dan keuangan.

2. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

6. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

7. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

8. Tepat Waktu

Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

9. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya.

2.1.7 Posisi dan Unsur Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.12 (2009), posisi keuangan suatu entitas terdiri dari posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsurunsur ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

4. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham.

Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penghasilan (income)

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

2. Beban (expenses)

Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan menjadi inspirasi penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Raflesia Nurdita	2012	Analisis Penerapan	Sebagian besar koperasi
			Standar Akuntansi	yang ada di kota Dumai
			Entitas Tanpa	sudah melakukan
			Akuntabilitas Publik	pelaporan keuangan
			(SAK ETAP) Pada	sederhana namun hanya
			Koperasi yang ada di	sebagian kecil yang
			kota Dumai.	sudah benar-benar
				menerapkan SAK
				ETAP ke dalam laporan
				keuangannya.
2.	Iim Ma'rifatul	2012	Penerapan Akuntansi	Para pedagang UKM
	Auliyah		Berdasarkan SAK	Kampung Batik
			ETAP pada UKM	antusias dan
			Kampung Batik di	menerapkan SAK
			Sidoarjo	ETAP ke dalam laporan
				keuangan.
3.	Jevon Tanugraha	2012	Evaluasi Standar	PT. TDMN telah
			Akuntansi Keuangan	membuat laporan
			Entitas Tanpa	keuangan sesuai dengan
			Akuntabilitas Publik	prinsip-prinsip SAK
			Pada PT. TDMN.	ETAP.

4.	Hermon Adhy Putra	2012	Penyusunan Laporan	Banyak UKM yang
	dan Elisabeth Penti		Keuangan Untuk	belum menerapkan
	Kurniawati		Usaha Kecil dan	SAK ETAP ke dalam
			Menengah (UKM)	laporan keuangannya,
			Berbasis Standar	bahkan ada beberapa
			Akuntansi Keuangan	yang belum mengenal
			Entitas Tanpa	dan mengetahui standar
			Akuntabilitas Publik	akuntansi yang berlaku
			(SAK ETAP).	